



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KOMARUDIN**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **710466**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **1.481.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 392 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 84.000.000
4. Tanah Seluas 546 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/119 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 1381 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
9. Tanah Seluas 893 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **125.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ETIOS G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.823.888
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.613.823.888
III. HUTANG	Rp.	25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.588.823.888

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.